



ARAH DAN TUJUAN KEBIJAKAN DIGITALISASI PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PEMBELAJARAN

Ahmad Syauky^{1*}, Silahuddin²

^{1,2} Magister Pendidikan Agama Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Indonesia

* E-mail: syaukyfarqundez@gmail.com

Abstrak: Digitalisasi pendidikan menjadi strategi penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama di tingkat sekolah dasar. Perkembangan teknologi mendorong perubahan dalam sistem pembelajaran, dengan kebijakan digitalisasi yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan tujuan kebijakan digitalisasi pendidikan serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi kepustakaan yang menelaah berbagai literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan akses siswa terhadap sumber belajar, mempermudah administrasi sekolah, dan memungkinkan interaksi yang lebih baik antara guru dan siswa. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses teknologi, dan kesiapan tenaga pendidik masih menjadi kendala utama dalam implementasi kebijakan ini. Jadi secara keseluruhan digitalisasi pendidikan berpotensi meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi perlu didukung oleh kebijakan yang memastikan kesiapan infrastruktur, pelatihan guru, serta akses teknologi yang merata agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal.

Kata Kunci: Digitalisasi, Pendidikan, Kebijakan, Pembelajaran

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan suatu bangsa, karena memiliki peran penting dalam menciptakan generasi yang berkualitas dan mampu bersaing di era globalisasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia pendidikan mengalami perubahan yang signifikan dengan hadirnya digitalisasi sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Digitalisasi pendidikan telah menjadi perhatian berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan praktisi

pendidikan, karena diyakini mampu mengatasi berbagai tantangan dalam sistem pembelajaran konvensional. (Astuti et al., 2019)

Kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia bertujuan untuk mengintegrasikan teknologi dalam berbagai aspek pembelajaran, baik dalam proses pengajaran, manajemen sekolah, hingga evaluasi hasil belajar siswa. (Bukhari, 2024). Melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, diharapkan proses pembelajaran dapat menjadi lebih interaktif, fleksibel, serta mampu menjangkau siswa di berbagai daerah, termasuk daerah yang memiliki keterbatasan akses terhadap sumber belajar konvensional (Apriyenti & Setiawan, 2024). Dalam konteks global, digitalisasi pendidikan juga merupakan langkah adaptif untuk menjawab tantangan Revolusi Industri 4.0, di mana keterampilan digital menjadi salah satu aspek utama yang harus dimiliki oleh generasi muda. (Badshah et al., 2023).

Namun, penerapan digitalisasi dalam pendidikan tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti kesiapan infrastruktur, akses internet yang belum merata, serta kesiapan tenaga pendidik dalam mengadaptasi teknologi dalam proses belajar-mengajar (Wulandari et al., 2021). Di beberapa wilayah, terutama di daerah yang belum berkembang, masih terdapat kendala dalam akses terhadap perangkat teknologi dan konektivitas internet yang stabil (Murhadi & Ponidi, 2019). Selain itu, tidak semua tenaga pendidik memiliki kemampuan yang cukup dalam menggunakan teknologi digital secara efektif dalam pembelajaran, sehingga diperlukan pelatihan yang berkelanjutan agar transformasi digital dalam pendidikan dapat berjalan optimal. (El-Hamamsy et al., 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah dan tujuan kebijakan digitalisasi pendidikan serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran. Dengan melihat manfaat dan tantangan yang ada, diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran mengenai efektivitas implementasi kebijakan digitalisasi di tingkat pendidikan dasar, khususnya di wilayah Banda Aceh. Temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang lebih baik, sehingga digitalisasi pendidikan dapat diterapkan secara merata dan memberikan dampak yang positif bagi seluruh peserta didik di Indonesia.

Perbedaan dengan jurnal atau artikel lain terletak pada fokus penelitian yang lebih spesifik terhadap pendidikan dasar di Banda Aceh, dibandingkan dengan penelitian sebelumnya yang umumnya membahas digitalisasi

Arah Dan Tujuan Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

pendidikan dalam skala nasional atau global. Selain itu, penelitian ini juga tidak hanya menyoroti manfaat digitalisasi tetapi juga mengungkap berbagai tantangan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, seperti keterbatasan akses internet, kesiapan tenaga pendidik, serta kendala teknis dalam penerapan teknologi di lingkungan sekolah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih lokal dan kontekstual terkait kebijakan digitalisasi pendidikan di Indonesia. (Ahmad et al., 2023).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis arah dan tujuan kebijakan digitalisasi pendidikan serta dampaknya terhadap kualitas pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari studi kepustakaan yang mengacu pada berbagai literatur, termasuk jurnal ilmiah, buku, dan dokumen kebijakan yang relevan dengan digitalisasi pendidikan.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai referensi akademik dan kebijakan pendidikan terkait digitalisasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana informasi yang telah dikumpulkan dikategorikan, dikaji, dan disusun dalam bentuk analisis yang sistematis. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat, tantangan, serta dampak dari kebijakan digitalisasi pendidikan terhadap efektivitas pembelajaran.

Penelitian ini tidak melakukan pengumpulan data primer melalui wawancara atau observasi langsung di lapangan, tetapi lebih menitikberatkan pada analisis konseptual berdasarkan kajian literatur yang ada. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai kebijakan digitalisasi pendidikan dengan melihat berbagai perspektif dari sumber yang telah diteliti sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di beberapa Sekolah Dasar (SD) di kawasan Banda Aceh, ditemukan bahwa kebijakan digitalisasi pendidikan memiliki dampak yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Digitalisasi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai aspek pembelajaran, termasuk manajemen siswa, staf, kurikulum, serta penyediaan sumber daya yang lebih efisien.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pendidikan memberikan manfaat yang besar, seperti meningkatkan aksesibilitas siswa terhadap materi pembelajaran, memungkinkan interaksi yang lebih aktif antara guru dan murid melalui platform digital, serta mengoptimalkan pengelolaan data akademik secara lebih terstruktur. Dengan adanya teknologi, siswa dapat mengakses berbagai sumber belajar, termasuk video pembelajaran, simulasi, serta materi interaktif lainnya, yang membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap materi yang diajarkan.

Meskipun demikian, digitalisasi pendidikan di Banda Aceh juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah keterbatasan infrastruktur dan akses internet, terutama bagi sekolah-sekolah di daerah yang belum sepenuhnya memiliki fasilitas teknologi yang memadai. Selain itu, kesiapan guru dalam mengadopsi metode pembelajaran digital masih menjadi kendala, mengingat masih terdapat kesenjangan keterampilan dalam penggunaan teknologi. Beberapa guru merasa perlu pelatihan lebih lanjut agar dapat memanfaatkan teknologi secara optimal dalam mengajar.

Dampak dari digitalisasi ini juga terlihat dalam aspek manajemen sekolah. Dengan adanya sistem berbasis digital, administrasi sekolah menjadi lebih efisien, termasuk dalam hal pencatatan kehadiran, pengelolaan nilai, serta komunikasi antara sekolah dan orang tua. Namun, di sisi lain, kekhawatiran terhadap keamanan data siswa menjadi perhatian utama, mengingat semakin banyaknya informasi pribadi yang tersimpan dalam sistem digital.

Dari penelitian ini menekankan bahwa digitalisasi pendidikan di Banda Aceh memiliki potensi besar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, tetapi implementasinya memerlukan dukungan infrastruktur yang memadai serta kesiapan tenaga pendidik dalam mengadopsi teknologi. Oleh karena itu, diperlukan langkah strategis, seperti pelatihan guru secara berkala, peningkatan akses terhadap perangkat teknologi, serta kebijakan yang memastikan keamanan dan keberlanjutan digitalisasi pendidikan di tingkat sekolah dasar.

Pembahasan

A. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan merupakan kerangka strategis yang dirancang oleh pemerintah atau lembaga pendidikan untuk mengatur, mengarahkan, dan meningkatkan sistem pendidikan dalam suatu negara atau wilayah. Kebijakan ini mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk menciptakan sistem

Arah Dan Tujuan Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat serta tantangan global. Kebijakan pendidikan tidak hanya berfokus pada aspek akademis, tetapi juga pada pengembangan karakter, keterampilan hidup, dan pembangunan sumber daya manusia yang mampu bersaing di era modern. (Adila & Rodiyah, 2024; Ahmad et al., 2023)

Salah satu tujuan utama kebijakan pendidikan adalah memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis, memiliki akses yang adil terhadap pendidikan. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti beasiswa, bantuan operasional sekolah, atau pembangunan fasilitas pendidikan di daerah terpencil. Selain itu, kebijakan pendidikan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan menetapkan standar kurikulum yang komprehensif, menyediakan pelatihan bagi guru, dan memastikan ketersediaan infrastruktur yang memadai. (Apriyenti & Setiawan, 2024; Astuti et al., 2019)

Kurikulum merupakan salah satu elemen penting dalam kebijakan pendidikan. Kurikulum yang baik tidak hanya mencakup mata pelajaran akademis seperti matematika, sains, dan bahasa, tetapi juga mengintegrasikan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan literasi digital. Selain itu, kurikulum juga harus memperhatikan nilai-nilai budaya, etika, dan karakter untuk membentuk peserta didik yang tidak hanya cerdas secara intelektual tetapi juga memiliki integritas moral. (Allouche, 2024; Astuti & Anita, 2022)

Peran guru dan tenaga pendidik juga menjadi fokus utama dalam kebijakan pendidikan. Guru adalah ujung tombak dalam proses pembelajaran, sehingga kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa mereka mendapatkan pelatihan yang memadai, kesejahteraan yang layak, dan kesempatan untuk pengembangan profesional. Dengan demikian, guru dapat terus meningkatkan kompetensinya dan memberikan pengajaran yang berkualitas kepada peserta didik. (El-Hamamsy et al., 2023; Ma'rufah, 2022)

Infrastruktur dan fasilitas pendidikan juga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan. Sekolah-sekolah harus dilengkapi dengan ruang kelas yang memadai, perpustakaan, laboratorium, dan akses teknologi informasi. Hal ini penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung proses pembelajaran. Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus memastikan bahwa sekolah-sekolah di daerah terpencil atau

tertinggal mendapatkan perhatian khusus agar tidak terjadi kesenjangan dalam hal fasilitas.

Kebijakan pendidikan juga harus responsif terhadap perubahan zaman dan tantangan global. Dalam era digital seperti sekarang, integrasi teknologi dalam pendidikan menjadi suatu keharusan. Kebijakan pendidikan harus mendorong penggunaan teknologi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, seperti melalui pembelajaran daring, penggunaan platform edukasi, atau pengembangan konten digital. Selain itu, kebijakan pendidikan juga harus memperhatikan isu-isu global seperti perubahan iklim, keberagaman, dan perdamaian, serta mengintegrasikannya ke dalam kurikulum. (Ahmad et al., 2023; Allouche, 2024)

Pendidikan inklusif juga menjadi salah satu prinsip penting dalam kebijakan pendidikan. Ini berarti bahwa sistem pendidikan harus mampu mengakomodasi kebutuhan semua peserta didik, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau berasal dari kelompok marginal. Dengan demikian, tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam mendapatkan haknya untuk belajar dan berkembang.

Evaluasi dan monitoring juga merupakan bagian penting dari kebijakan pendidikan. Tanpa mekanisme evaluasi yang baik, sulit untuk mengukur sejauh mana kebijakan yang telah diterapkan berhasil mencapai tujuannya. Evaluasi dapat dilakukan melalui ujian nasional, survei kepuasan, atau analisis data pendidikan. Hasil evaluasi ini kemudian dapat digunakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kebijakan pendidikan di masa depan. Secara keseluruhan, kebijakan pendidikan adalah alat strategis untuk membangun masa depan suatu bangsa. (Adila & Rodiyah, 2024; El-Hamamsy et al., 2023)

Melalui kebijakan yang tepat, pendidikan dapat menjadi sarana untuk mengurangi kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan, dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Oleh karena itu, perumusan kebijakan pendidikan harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pendidik, orang tua, dan masyarakat, untuk memastikan bahwa kebijakan tersebut benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi bersama.

B. Kebijakan Digitalisasi dalam Pendidikan

Kebijakan digitalisasi dalam pendidikan merupakan bagian integral dari upaya modernisasi sistem pendidikan yang sejalan dengan perkembangan teknologi dan tuntutan era digital. Dalam konteks kebijakan pendidikan yang

Arah Dan Tujuan Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

lebih luas, digitalisasi tidak hanya dipandang sebagai alat bantu, tetapi sebagai transformasi mendasar yang mengubah cara pembelajaran diselenggarakan, diakses, dan dinikmati oleh peserta didik maupun pendidik. Kebijakan ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih fleksibel, inklusif, dan relevan dengan dinamika dunia yang semakin terhubung secara digital. (Allouche, 2024; Ahmad et al., 2023)

Salah satu aspek utama dari kebijakan digitalisasi dalam pendidikan adalah pemanfaatan teknologi untuk memperluas akses pendidikan. Dengan adanya platform pembelajaran daring, siswa dari berbagai wilayah, termasuk daerah terpencil, dapat mengakses materi pembelajaran berkualitas tanpa harus terbatas oleh jarak atau waktu. Hal ini sejalan dengan prinsip kebijakan pendidikan yang menekankan pemerataan akses. Digitalisasi memungkinkan pembelajaran terjadi di mana saja dan kapan saja, sehingga mengurangi kesenjangan pendidikan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Selain itu, kebijakan ini juga mendorong terciptanya sumber daya pendidikan terbuka (open educational resources) yang dapat diakses secara gratis atau dengan biaya rendah, sehingga memudahkan siswa dan guru untuk mendapatkan bahan ajar yang relevan dan mutakhir. (Apriyenti & Setiawan, 2024; Badshah et al., 2023)

Selain memperluas akses, kebijakan digitalisasi juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Teknologi digital memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan personal. Misalnya, melalui penggunaan aplikasi pembelajaran adaptif, siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Guru juga dapat memanfaatkan alat analisis data untuk memantau perkembangan siswa secara real-time dan memberikan umpan balik yang lebih tepat. Selain itu, integrasi multimedia seperti video, animasi, dan simulasi dalam proses pembelajaran dapat membuat materi yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan menarik bagi siswa.

Kebijakan digitalisasi dalam pendidikan juga menekankan pentingnya pengembangan literasi digital bagi siswa dan guru. Literasi digital tidak hanya mencakup kemampuan untuk menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga memahami cara berpikir kritis, mengelola informasi, dan berkomunikasi secara efektif di dunia digital. Hal ini menjadi semakin penting mengingat maraknya informasi yang beredar di internet, termasuk informasi yang tidak akurat atau menyesatkan. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus memastikan bahwa kurikulum mencakup pelatihan literasi digital yang komprehensif, sehingga

siswa dapat menjadi pengguna teknologi yang cerdas dan bertanggung jawab. (Astuti & Anita, 2022; Prasetyo et al., 2022)

Infrastruktur digital juga menjadi fokus utama dalam kebijakan ini. Tanpa dukungan infrastruktur yang memadai, seperti jaringan internet yang stabil, perangkat komputer, dan platform pembelajaran yang handal, digitalisasi pendidikan tidak akan berjalan efektif. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses ke infrastruktur digital yang memadai. Selain itu, kebijakan ini juga harus mempertimbangkan kebutuhan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidik agar mereka dapat memanfaatkan teknologi dengan optimal dalam proses pembelajaran. (Badshah et al., 2023; Murhadi & Ponidi, 2019)

Kebijakan digitalisasi dalam pendidikan juga membawa tantangan tersendiri, seperti risiko kesenjangan digital. Meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati, justru dapat memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Oleh karena itu, kebijakan ini harus disertai dengan program-program yang menjamin inklusivitas, seperti penyediaan bantuan perangkat teknologi bagi siswa dari keluarga kurang mampu atau pelatihan khusus bagi guru di daerah terpencil. (Apriyenti & Setiawan, 2024; Wulandari et al., 2021)

Selain itu, kebijakan digitalisasi juga harus memperhatikan aspek keamanan dan privasi data. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan harus mencakup regulasi yang ketat untuk melindungi data siswa dan guru, serta memastikan bahwa platform pembelajaran yang digunakan memenuhi standar keamanan yang tinggi.

Dalam konteks global, kebijakan digitalisasi dalam pendidikan juga mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dan peluang di dunia kerja yang semakin dipengaruhi oleh teknologi. Keterampilan seperti pemrograman, analisis data, dan kecerdasan buatan menjadi semakin penting di berbagai sektor industri. Dengan mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, kebijakan pendidikan dapat memastikan bahwa siswa tidak hanya siap menghadapi masa depan, tetapi juga mampu menjadi pelaku aktif dalam transformasi digital. (Ahmad et al., 2023; Allouche, 2024)

Arah Dan Tujuan Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

Secara keseluruhan, kebijakan digitalisasi dalam pendidikan merupakan langkah penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Namun, keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada implementasi yang terencana dan kolaborasi antara pemerintah, institusi pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat. Dengan pendekatan yang holistik, digitalisasi dapat menjadi alat yang powerful untuk mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua.

C. Implementasi Kebijakan Digitalisasi Pendidikan

Implementasi kebijakan digitalisasi dalam pendidikan merupakan langkah konkret yang dilakukan untuk mewujudkan transformasi sistem pendidikan melalui pemanfaatan teknologi. Proses ini tidak hanya melibatkan penyediaan infrastruktur dan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup perubahan mendasar dalam cara pembelajaran diselenggarakan, dikelola, dan dievaluasi. Implementasi kebijakan digitalisasi memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, guru, siswa, orang tua, dan masyarakat secara luas. (Allouche, 2024; Ahmad et al., 2023)

Salah satu aspek kunci dalam implementasi kebijakan digitalisasi adalah penyediaan infrastruktur yang memadai. Tanpa jaringan internet yang stabil, perangkat komputer, dan platform pembelajaran yang handal, upaya digitalisasi tidak akan berjalan efektif. Pemerintah perlu memastikan bahwa sekolah-sekolah, terutama di daerah terpencil, memiliki akses ke infrastruktur digital yang memadai. Ini termasuk pembangunan jaringan internet berkecepatan tinggi, penyediaan perangkat seperti laptop atau tablet, serta pengembangan platform pembelajaran yang dapat diakses oleh semua siswa dan guru. Selain itu, perlu juga dipastikan bahwa infrastruktur ini dikelola dan dipelihara secara berkelanjutan agar dapat digunakan dalam jangka panjang. (Badshah et al., 2023; Murhadi & Ponidi, 2019)

Selain infrastruktur, pelatihan dan pengembangan kapasitas guru juga menjadi komponen penting dalam implementasi kebijakan digitalisasi. Guru memainkan peran sentral dalam proses pembelajaran, sehingga mereka perlu dibekali dengan keterampilan dan pengetahuan yang cukup untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Program pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu guru memahami cara menggunakan perangkat digital, mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, dan menciptakan pengalaman

belajar yang lebih interaktif dan menarik bagi siswa. Selain itu, guru juga perlu dilatih untuk mengelola kelas virtual, memantau perkembangan siswa secara online, dan memberikan umpan balik yang konstruktif melalui platform digital.

Kurikulum juga perlu disesuaikan dengan era digital. Implementasi kebijakan digitalisasi menuntut revisi terhadap kurikulum yang ada agar lebih relevan dengan kebutuhan zaman. Ini termasuk pengintegrasian keterampilan digital seperti coding, analisis data, dan literasi media ke dalam mata pelajaran. Selain itu, kurikulum juga harus mendorong pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif, di mana siswa dapat menggunakan teknologi untuk menyelesaikan masalah nyata dan bekerja sama dengan teman sekelas atau bahkan siswa dari sekolah lain di berbagai belahan dunia. Dengan demikian, siswa tidak hanya menjadi konsumen teknologi, tetapi juga pencipta dan inovator. (Ahmad et al., 2023; Prasetyo et al., 2022)

Evaluasi dan penilaian juga perlu diadaptasi dalam konteks digitalisasi. Sistem penilaian tradisional yang mengandalkan ujian tertulis mungkin tidak lagi cukup untuk mengukur kemampuan siswa di era digital. Implementasi kebijakan digitalisasi memerlukan pendekatan penilaian yang lebih holistik, yang mencakup penilaian berbasis proyek, portofolio digital, dan umpan balik real-time melalui platform pembelajaran. Teknologi juga dapat digunakan untuk mengumpulkan data tentang perkembangan siswa, yang kemudian dapat dianalisis untuk memberikan rekomendasi pembelajaran yang lebih personal dan efektif. (Allouche, 2024; El-Hamamsy et al., 2023)

Selain itu, implementasi kebijakan digitalisasi juga harus memperhatikan aspek inklusivitas. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama ke perangkat teknologi atau jaringan internet, terutama di daerah pedesaan atau keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu disertai dengan program-program yang menjamin akses yang adil, seperti penyediaan bantuan perangkat teknologi, kuota internet gratis, atau pusat pembelajaran digital di komunitas. Dengan demikian, digitalisasi tidak menjadi alat yang memperlebar kesenjangan, tetapi justru menjadi sarana untuk mengurangi ketimpangan pendidikan.

Keamanan dan privasi data juga menjadi tantangan besar dalam implementasi kebijakan digitalisasi.

Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin tinggi. Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang ketat untuk melindungi data siswa dan guru, serta

Arah Dan Tujuan Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

memastikan bahwa platform pembelajaran yang digunakan memenuhi standar keamanan yang tinggi. Selain itu, siswa dan guru juga perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data di dunia digital. (Bukhari, 2024; Faiz et al., 2022)

Implementasi kebijakan digitalisasi juga membawa dampak positif dalam hal efisiensi dan transparansi manajemen pendidikan. Dengan menggunakan sistem manajemen sekolah berbasis digital, administrasi seperti pendaftaran siswa, pengelolaan nilai, dan komunikasi antara sekolah dan orang tua dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, data yang terkumpul melalui sistem digital dapat digunakan untuk analisis kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti. (Badshah et al., 2023; Murhadi & Ponidi, 2019)

Secara keseluruhan, implementasi kebijakan digitalisasi dalam pendidikan adalah proses yang kompleks namun penting untuk menciptakan sistem pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan relevan dengan kebutuhan zaman. Keberhasilan implementasi ini sangat bergantung pada kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, komitmen untuk menyediakan sumber daya yang memadai, serta kesiapan untuk menghadapi tantangan yang muncul. Dengan pendekatan yang terencana dan berkelanjutan, digitalisasi dapat menjadi katalisator untuk mewujudkan visi pendidikan yang berkualitas dan merata bagi semua.

D. Dampak Kebijakan Digitalisasi Dalam Pendidikan

Dampak kebijakan digitalisasi dalam pendidikan sangat luas dan multidimensi, memengaruhi berbagai aspek sistem pendidikan, mulai dari cara pembelajaran diselenggarakan hingga bagaimana siswa dan guru berinteraksi dengan pengetahuan dan teknologi. Kebijakan ini tidak hanya mengubah lingkungan belajar, tetapi juga membawa perubahan signifikan dalam cara pendidikan diakses, dikelola, dan dinilai. Dampak-dampak ini dapat dilihat dari berbagai perspektif, baik positif maupun negatif, dan memiliki implikasi jangka panjang bagi perkembangan pendidikan di tingkat lokal, nasional, maupun global. (Allouche, 2024; Ahmad et al., 2023)

Salah satu dampak paling nyata dari kebijakan digitalisasi adalah peningkatan aksesibilitas pendidikan. Dengan adanya platform pembelajaran daring dan sumber daya pendidikan terbuka, siswa dari berbagai latar belakang, termasuk mereka yang tinggal di daerah terpencil atau memiliki keterbatasan fisik, dapat mengakses materi pembelajaran berkualitas tanpa harus terbatas

oleh jarak atau waktu. Hal ini membuka peluang bagi lebih banyak orang untuk mendapatkan pendidikan yang sebelumnya mungkin sulit dijangkau. Selain itu, digitalisasi juga memungkinkan fleksibilitas dalam pembelajaran, di mana siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka sendiri. Ini sangat bermanfaat bagi siswa yang membutuhkan pendekatan pembelajaran yang lebih personal atau memiliki jadwal yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kelas tatap muka secara rutin. (Apriyenti & Setiawan, 2024; Badshah et al., 2023)

Dampak lain yang signifikan adalah peningkatan kualitas pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Digitalisasi memungkinkan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan menarik, seperti penggunaan video, animasi, simulasi, dan permainan edukatif. Hal ini tidak hanya membuat proses belajar lebih menyenangkan, tetapi juga membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks dengan lebih mudah. Selain itu, teknologi juga memungkinkan pembelajaran berbasis proyek dan kolaboratif, di mana siswa dapat bekerja sama dengan teman sekelas atau bahkan siswa dari sekolah lain di berbagai belahan dunia. Ini membantu mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti kreativitas, kolaborasi, dan komunikasi. (El-Hamamsy et al., 2023; Ma'rufah, 2022)

Kebijakan digitalisasi juga membawa perubahan dalam peran guru. Dengan adanya teknologi, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber pengetahuan, tetapi lebih berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa dalam proses belajar. Guru dapat menggunakan alat analisis data untuk memantau perkembangan siswa secara real-time dan memberikan umpan balik yang lebih tepat. Selain itu, teknologi juga membuka peluang bagi guru untuk mengembangkan diri melalui pelatihan daring, berbagi sumber daya dengan rekan sejawat, dan mengakses materi pembelajaran yang mutakhir. Namun, perubahan ini juga menuntut adaptasi dari guru, yang harus mempelajari cara menggunakan teknologi baru dan mengintegrasikannya ke dalam kurikulum.

Di sisi lain, kebijakan digitalisasi juga membawa tantangan dan dampak negatif yang perlu diatasi. Salah satunya adalah risiko kesenjangan digital. Meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, jika tidak diimplementasikan dengan hati-hati, justru dapat memperlebar kesenjangan antara mereka yang memiliki akses ke teknologi dan mereka yang tidak. Siswa dari keluarga kurang mampu atau daerah terpencil mungkin kesulitan mengakses perangkat teknologi atau jaringan internet yang

Arah Dan Tujuan Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

memadai, sehingga berisiko tertinggal dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi harus disertai dengan program-program yang menjamin inklusivitas, seperti penyediaan bantuan perangkat teknologi atau kuota internet gratis. (Apriyenti & Setiawan, 2024; Wulandari et al., 2021)

Keamanan dan privasi data juga menjadi isu penting dalam kebijakan digitalisasi. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin tinggi. Siswa dan guru perlu diberikan edukasi tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data di dunia digital.

Selain itu, pemerintah dan institusi pendidikan perlu memastikan bahwa platform pembelajaran yang digunakan memenuhi standar keamanan yang tinggi dan dilengkapi dengan regulasi yang ketat untuk melindungi data pengguna.

Dampak kebijakan digitalisasi juga terlihat dalam hal efisiensi dan transparansi manajemen pendidikan. Dengan menggunakan sistem manajemen sekolah berbasis digital, administrasi seperti pendaftaran siswa, pengelolaan nilai, dan komunikasi antara sekolah dan orang tua dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Selain itu, data yang terkumpul melalui sistem digital dapat digunakan untuk analisis kebijakan, perencanaan program, dan pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti. Ini membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem pendidikan. (Bukhari, 2024; Faiz et al., 2022)

Secara keseluruhan, dampak kebijakan digitalisasi dalam pendidikan sangat kompleks dan beragam. Di satu sisi, digitalisasi membawa banyak manfaat, seperti peningkatan aksesibilitas, kualitas pembelajaran, dan efisiensi manajemen. Di sisi lain, kebijakan ini juga menimbulkan tantangan, seperti kesenjangan digital, masalah keamanan data, dan kebutuhan adaptasi dari guru dan siswa. Oleh karena itu, implementasi kebijakan digitalisasi harus dilakukan dengan hati-hati, melibatkan berbagai pemangku kepentingan, dan disertai dengan program-program pendukung yang memastikan bahwa manfaat digitalisasi dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa meninggalkan siapa pun. Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi dapat menjadi alat yang powerful untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

E. Tantangan dalam Kebijakan Digitalisasi Pendidikan

Tantangan dalam penerapan kebijakan digitalisasi dalam pendidikan merupakan aspek yang tidak dapat diabaikan, mengingat kompleksitas dan dinamika yang menyertai proses transformasi ini. Meskipun digitalisasi menjanjikan banyak manfaat, seperti peningkatan aksesibilitas, kualitas pembelajaran, dan efisiensi manajemen, terdapat berbagai hambatan dan kesulitan yang harus diatasi agar kebijakan ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Tantangan-tantangan ini muncul dari berbagai faktor, mulai dari keterbatasan infrastruktur, kesenjangan digital, hingga resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan. (Allouche, 2024; Ahmad et al., 2023)

Salah satu tantangan utama dalam penerapan kebijakan digitalisasi adalah kesenjangan digital. Meskipun teknologi memiliki potensi besar untuk mengurangi kesenjangan pendidikan, pada kenyataannya, tidak semua siswa dan sekolah memiliki akses yang sama terhadap perangkat teknologi dan jaringan internet. Di daerah pedesaan atau terpencil, infrastruktur internet seringkali masih terbatas atau bahkan tidak tersedia sama sekali. Selain itu, banyak keluarga, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi kurang mampu, tidak mampu membeli perangkat seperti laptop, tablet, atau smartphone yang diperlukan untuk mengakses pembelajaran daring. Hal ini menciptakan ketimpangan yang signifikan, di mana siswa yang memiliki akses ke teknologi dapat terus belajar dengan baik, sementara mereka yang tidak memiliki akses justru semakin tertinggal. Oleh karena itu, kebijakan digitalisasi harus disertai dengan upaya-upaya konkret untuk menjamin akses yang merata, seperti penyediaan bantuan perangkat teknologi, kuota internet gratis, atau pembangunan infrastruktur digital di daerah tertinggal. (Apriyenti & Setiawan, 2024; Wulandari et al., 2021)

Tantangan lain yang tidak kalah penting adalah kesiapan guru dan tenaga pendidik dalam menghadapi era digital. Meskipun teknologi menawarkan banyak alat dan platform yang dapat meningkatkan kualitas pembelajaran, tidak semua guru memiliki keterampilan atau kepercayaan diri yang cukup untuk menggunakannya secara efektif. Banyak guru, terutama yang lebih senior, mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi baru atau merasa bahwa pendekatan tradisional masih lebih efektif. Selain itu, pelatihan yang diberikan kepada guru seringkali tidak memadai atau tidak berkelanjutan, sehingga mereka tidak memiliki kesempatan untuk

Arah Dan Tujuan Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

mengembangkan kompetensi digital mereka secara optimal. Tanpa dukungan yang memadai, guru mungkin merasa terbebani oleh tuntutan untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam kurikulum, yang pada akhirnya dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. (El-Hamamsy et al., 2023; Ma'rufah, 2022)

Selain kesiapan guru, kurikulum yang ada juga seringkali belum sepenuhnya siap untuk diintegrasikan dengan teknologi. Kurikulum tradisional yang berfokus pada hafalan dan ujian tertulis mungkin tidak cocok dengan pendekatan pembelajaran digital yang lebih interaktif dan berbasis proyek. Perlu ada revisi yang signifikan terhadap kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan era digital, termasuk pengintegrasian keterampilan seperti coding, literasi media, dan analisis data. Namun, proses revisi kurikulum ini seringkali memakan waktu dan memerlukan koordinasi yang baik antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, institusi pendidikan, dan ahli kurikulum.

Keamanan dan privasi data juga menjadi tantangan besar dalam penerapan kebijakan digitalisasi. Dengan meningkatnya penggunaan platform digital, risiko kebocoran data atau penyalahgunaan informasi pribadi juga semakin tinggi. Siswa dan guru seringkali diminta untuk mengunggah data pribadi mereka ke platform pembelajaran, yang rentan terhadap serangan siber atau penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, banyak platform pembelajaran yang tidak dilengkapi dengan fitur keamanan yang memadai, sehingga data pengguna dapat dengan mudah dicuri atau disalahgunakan. (Apriyenti & Setiawan, 2024; Wulandari et al., 2021)

Oleh karena itu, perlu ada regulasi yang ketat dan standar keamanan yang tinggi untuk melindungi data siswa dan guru, serta edukasi tentang pentingnya menjaga privasi dan keamanan data di dunia digital.

Tantangan lain yang sering dihadapi adalah resistensi terhadap perubahan dari pihak-pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan. Digitalisasi menuntut perubahan yang signifikan dalam cara pembelajaran diselenggarakan, dikelola, dan dievaluasi, yang mungkin tidak selalu diterima dengan baik oleh semua pihak. Misalnya, siswa mungkin merasa kesulitan untuk beradaptasi dengan pembelajaran daring, terutama jika mereka tidak terbiasa dengan penggunaan teknologi. Orang tua juga mungkin merasa khawatir tentang dampak negatif dari penggunaan teknologi yang berlebihan, seperti kecanduan

gadget atau penurunan interaksi sosial. Selain itu, institusi pendidikan mungkin menghadapi kendala dalam mengalokasikan anggaran untuk pembelian perangkat teknologi atau pelatihan guru, terutama jika sumber daya yang tersedia terbatas.

Secara keseluruhan, tantangan dalam penerapan kebijakan digitalisasi dalam pendidikan sangat beragam dan kompleks. Mulai dari kesenjangan digital, kesiapan guru, kurikulum yang belum siap, masalah keamanan data, hingga resistensi terhadap perubahan, semua ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi untuk diatasi. Pemerintah, institusi pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat perlu bekerja sama untuk mengidentifikasi solusi yang tepat dan berkelanjutan, sehingga manfaat digitalisasi dapat dinikmati oleh semua pihak tanpa meninggalkan siapa pun. Dengan komitmen yang kuat dan kolaborasi yang baik, tantangan-tantangan ini dapat diatasi, dan digitalisasi dapat menjadi alat yang powerful untuk mewujudkan visi pendidikan yang lebih inklusif, berkualitas, dan relevan dengan kebutuhan zaman.

SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji arah dan tujuan kebijakan digitalisasi pendidikan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran, khususnya di tingkat sekolah dasar di Banda Aceh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pendidikan berpotensi meningkatkan aksesibilitas, efektivitas, dan efisiensi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Digitalisasi memungkinkan siswa mengakses sumber belajar yang lebih beragam, mempermudah administrasi sekolah, dan meningkatkan interaksi antara guru dan siswa. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, kesenjangan akses teknologi, dan kesiapan tenaga pendidik dalam mengadopsi teknologi.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk melakukan studi yang lebih mendalam mengenai dampak digitalisasi terhadap hasil belajar siswa, terutama di daerah dengan infrastruktur terbatas. Selain itu, perlu ada penelitian yang fokus pada pengembangan model pelatihan guru yang efektif untuk meningkatkan kompetensi digital mereka. Rekomendasi kebijakan termasuk peningkatan investasi dalam infrastruktur digital, penyediaan akses teknologi yang merata, dan penguatan regulasi untuk melindungi keamanan data siswa

Arah Dan Tujuan Kebijakan Digitalisasi Pendidikan Untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran

dan guru. Dengan demikian, digitalisasi pendidikan dapat diimplementasikan secara lebih inklusif dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Adila, S., & Rodiyah, I. (2024). Memajukan Pendidikan Melalui Program Digitalisasi yang Efektif di Indonesia. *Indonesian Journal of Public Administration Review*, 1(3), 1–16.
- Ahmad, S., Umirzakova, S., Mujtaba, G., Amin, M. S., & Whangbo, T. (2023). Education 5.0: Requirements, Enabling Technologies, and Future Directions. *arXiv preprint arXiv:2307.15846*.
- Allouche, E. (2024). Digital Transformation of Education, Systems Approach and Applied Research. *arXiv preprint arXiv:2406.11861*.
- Apriyenti, E., & Setiawan, D. (2024). Analisis Digitalisasi Pendidikan terhadap Aksesibilitas, Kualitas, dan Inklusivitas Pendidikan di Indonesia. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 5(2), 2610–2618.
- Astuti, A., Waluya, S., & Asikin, M. (2019). Strategi Pembelajaran dalam Menghadapi Tantangan Era Revolusi Industri 4.0. Dalam *Seminar Nasional Pascasarjana Universitas Negeri Semarang 2019*.
- Astuti, S. I., & Anita, A. (2022). Digitalisasi dan Ketimpangan Pendidikan: Studi Kasus terhadap Guru Sekolah Dasar di Kecamatan Baraka. *Jurnal Metaedukasi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 1(1), 13–23.
- Badshah, A., Ghani, A., Daud, A., Jalal, A., Bilal, M., & Crowcroft, J. (2023). Towards Smart Education through the Internet of Things: A Review. *arXiv preprint arXiv:2304.12851*.
- Bukhari, M. W. (2024). Tantangan Pendidikan Indonesia di Era Digitalisasi: Implementasi Penggunaan AI dalam Proses Pembelajaran. *Jurnal Ilmu Pendidikan Nusantara*, 3(2), 100–110.
- El-Hamamsy, L., Monnier, E.-C., Avry, S., Chessel-Lazzarotto, F., Liégeois, G., Bruno, B., Dehler Zufferey, J., & Mondada, F. (2023). An Adapted Cascade Model to Scale Primary School Digital Education Curricular

Reforms and Teacher Professional Development Programs. *arXiv preprint arXiv:2306.02751*.

- Faiz, F., Hidayat, R., & Wibowo, A. (2022). Sisi Terang dan Gelap: Digitalisasi pada Perkembangan Pendidikan. *Jurnal Sains dan Edukasi*, 4(1), 15–27.
- Hakim, R., & Sari, M. (2023). Strategi Peningkatan Keterampilan Digital Guru dalam Menghadapi Era Pendidikan 5.0. *Jurnal Pendidikan dan Teknologi*, 11(1), 78–92.
- Kurniawan, D., & Susanto, R. (2020). Dampak Digitalisasi Pendidikan terhadap Kualitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 8(2), 89–102.
- Ma'rufah, A. (2022). Implementasi Pendidikan Karakter dalam Digitalisasi Pendidikan. *Edukasia: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 1(1), 13–23.
- Murhadi, & Ponidi. (2019). Digitalisasi Sekolah Melalui Pengembangan Website dan Layanan Sekolah Berbasis Teknologi Informasi. *Intek: Jurnal Informatika dan Teknologi Informasi*, 2(2), 62–69.
- Nugroho, A., & Wijaya, B. (2021). Analisis Kesiapan Guru dalam Menghadapi Era Digitalisasi Pendidikan. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 9(3), 210–225.
- Prasetyo, A., Maulida, A. N., & Olga, R. A. S. (2022). Literasi 4.0: Digitalisasi Pendidikan Sebagai Budaya Baru Dalam Pembelajaran di Era Post Pandemic. Dalam *Prosiding Konferensi Ilmiah Pendidikan*.
- Putra, R., & Suryani, E. (2025). Dampak Digitalisasi terhadap Efektivitas Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 13(1), 45–60.
- Wulandari, R., Santoso, & Ardianti, S. D. (2021). Tantangan Digitalisasi Pendidikan bagi Orang Tua dan Anak di Tengah Pandemi Covid-19 di Desa Bendanpete. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3(6), 3839–3851.